



Catatan **DANLAN ISKAN**

## Angga Titin

**LUPAKAN** angka COVID-19. Yang Indonesia menjadi juara dunia itu. Bikin stres saja. Lebih baik baca *Disway* hari ini: bagaimana orang masih bisa kreatif di tengah pandemi. Mereka juga sangat bahagia: bisa tetap melangsungkan pernikahan. Biar pun akad nikah itu harus dilakukan di dalam bus -sambil muter-muter antar kecamatan.

Itu dilakukan Angga Hayu Joko Siswoyo, 26 tahun. Ia orang Klaten, Jateng. Yang mendapat istri orang Boyolali: Titin Rachmatul Ummah, 23 tahun, adik angkatan satu almamater. Sebenarnya Angga ingin kawin normal: 11 Juli 2021.

• Baca Angga... Hal 2



## Menjaga Moral dan Etika Publik

**PARA** politisi dan penyelenggara negara sepatutnya menghormati dan menjaga moralitas dan etika publik di era demokrasi dewasa ini. Hal ini penting dalam rangka menciptakan dan menjaga keadaban berdemokrasi. Terutama sekali di Bumi Etam, Kalimantan Timur.

Moral dan etika mesti menjadi dasar dari penegakan hukum dan pelaksanaan kebijakan. Baik di tataran kebijakan publik, maupun di dalam pengelolaan partai politik sebagai salah satu elemen penentu berjalannya demokrasi suatu negara. Tak ada demokrasi beradab tanpa partai politik yang bermartabat.

Dalam iklim demokrasi, terutama yang oleh Yudi Latif sebut sebagai "demokrasi luhur adab", etika, moral, dan keadilan untuk semua adalah kunci utama yang perlu dijaga, dilindungi, dan diwujudkan. Bahkan, moral



Oleh  
**NASRULLAH**

dianggap roh dari konstitusi. Bukan deretan pasal di dalamnya, apatahlagi tumpukan aturan - aturan yang mengikutinya.

Masyarakat Kalimantan Timur yang pernah akrab dengan slogan "*Membangun Kaltim Untuk Semua*", tentu paham betul arti sebuah keadilan yang terdistribusi untuk semua kalangan. Bukan untuk kelompok tertentu saja, terlebih bagi keluarga tersendiri semata. Keadilan publik yang dilandasi moral dan etika publik bermaksud mendistribusikan keadilan kepada semua *citizen* (warga negara).

Aktualisasi dari dasar moral mewujudkan dalam etika. Etika, dapat dimaknai sebagai tata perilaku yang melekat pada diri seseorang. Etika dan moral berkenaan dengan baik buruk dan kepatutan sebuah tindakan.

• Baca Menjaga... Hal 3

### MENJAGA

Sambungan halaman 1

Tidak semata bicara akan benar dan salah sebagaimana aturan hukum yang senantiasa "dicari celahnya" oleh kalangan oportunis dan pragmatis berkepentingan seesaat.

Olehnya itu, tak berlebihan kiranya Yudi Latif mengilustrasikan bahwa "hukum berenang di atas etika pada negara dengan demokrasi luhur adab". Tak perlu banyak aturan dengan beragam perdebatan tafsir yang mengikutinya. Apatahlagi, lembaga penafsir aturan. Warga negara, terlebih pejabat publik sudah paham apa yang patut dan apa yang tak pantas dalam urusan publik. Itu kalau di negara dengan demokrasi berkeadaban.

Dalam negara yang demokrasinya berkeadaban tersebut, moral dan etika publik benar - benar dijaga. Kepatutan di muka umum dihormati. Tak ada pejabat atau politisi yang krasak - krusuk hingga menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Apatahlagi berambisi mendudukkan keluarga dan kerabat dekatnya dalam jabatan publik. *Enough is enough* (cukup, sudah cukup), kata George Washington, Presiden pertama Amerika.

### MORAL DAN ETIKA PUBLIK

Moral dan etika ketika dihadapkan dengan urusan publik, maka keduanya mesti dilihat dalam kacamata kepentingan publik. Urusan publik adalah urusan mendistribusikan keadilan kata Jürgen Habermas. Olehnya, moral publik adalah perihal bagaimana baik dan buruknya seseorang di hadapan pendistribusian keadilan publik. Sementara itu, etika publik memeriksa tata perilaku seseorang dalam mewujudkan kebijakan publik. Apakah langkah yang dilakukan pantas atau tidak secara etika?

Para filsuf dan ilmuwan mengingatkan bahwa aturan hukum dan perilaku politik yang baik secara moral dan pantas secara etika, adalah yang berenang di atas lautan etika dan moral. Dengan kata lain, seorang politikus dan juga penegak hukum tak perlu Undang Undang berikut aturan yang menumpuk ketika landasan moral dan etika dipahami dan diamlkan dengan baik.

### MERAWAT KEADILAN PUBLIK

Dari penjelasan di atas, maka tak sulit untuk menilai laku politisi, wakil rakyat, dan penyelenggara negara dalam menjaga dan menegakkan moral

dan etika publik. Cukup memperhatikan seberapa setia mereka mengabdikan diri dalam mendistribusikan keadilan kepada masyarakat luas (publik). Bukan dengan "membenar - benarkan" segala cara untuk berkuasa. Terlebih jika kekuasaan itu diperuntukkan untuk sanak keluarga dan kolega dekatnya sebagaimana perilaku oligarki yang marak disoroti belakangan. Perilaku demikian bukan saja cacat secara moral, namun juga minus etika.

Apatahlagi, di tengah keberagaman Indonesia, dan terkhusus di Kalimantan Timur, moral publik dan etika kehidupan berbangsa dengan keragaman etnik, agama, ras, dan afiliasi sosial budaya serta politik, penting untuk terus dijaga dan dirawat dengan baik. Kalimantan memiliki pengalaman manis sekaligus pahit dalam menjalani kehidupan berbangsa. Ingatan masyarakat Kalimantan, khususnya Bumi Etam terlalu pendek untuk melupakan ujian - ujian kebangsaan kita yang tak ada duanya dari segi keberagaman ini.

Kita mesti terus mengingat dan saling mengingatkan bahwa di tengah ketimpangan sosial ekonomi, dan semakin defisitnya moral dan etika pub-

lik para politikus dan kaum beruang, kehidupan berbangsa penting untuk terus dijaga. Perilaku serakah (*greedy*) tentu tak berkesesuaian dengan tujuan merawat kebangsaan dan terdistribusinya keadilan publik sebagaimana dalil Habermas di atas. Politikus minus etika dan cacat moral dikarenakan oleh bermainnya uang di segala sektor dan diburunya jabatan publik dengan berbagai cara, merupakan awan mendung bagi demokrasi kita hari ini.

Menjadi kaya dan berkuasa tentu tidak dilarang oleh negara dan agama manapun. Namun, landasan moral dan pagar etik tak boleh dilabrak begitu saja. Keadilan dan perasaan publik tetap harus dihormati.

Kepentingan publik tentu tak cukup terakomodir jika negara hanya diselenggarakan atas nama perburuan kekuasaan dan pertahanan kekayaan ala politikus oportunis dan kaum oligark semata.

Publik Kaltim pantas menjaga *dignity* (marwahnya) demi keadaban berdemokrasi di Bumi Etam ini.

\*Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman